



LAPORAN KINERJA

DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini bertujuan memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Laporan Kinerja pada hakekatnya merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis organisasi.

Laporan Kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja baik untuk Dinas Kesehatan sendiri maupun pihak lain yang membutuhkan, sebagai upaya penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Cimahi, Februari 2019
**Kepala Dinas Kesehatan
Kota Cimahi**



drg. PRATIWI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196206191989012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. Latar Belakang.....1

 B. Maksud dan Tujuan.....2

 C. Gambaran Umum Perangkat Daerah3

 D. Sumber Daya Manusia.....12

 E. Issue Strategis13

BAB II PERJANJIAN KINERJA.....17

 A. Rencana Strategis.....17

 B. Perjanjian Kinerja19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA21

 A. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama tahun 201822

 B. Realisasi Anggaran31

BAB IV PENUTUP43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keadaan Tenaga Berdasarkan Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2015-201812

Tabel 2. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Beserta Indikator Kinerja Tahun 201819

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 201820

Tabel 4. Program Dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2018.....20

Tabel 5. Skala Nilai Peringkat Kinerja22

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama tahun 201823

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017-2018.....24

Tabel 8. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2018.....31

Tabel 9. Realisasi Anggaran per Program Tahun 2018.....32

Tabel 10. Realisasi Pemanfaatan Anggaran Kegiatan Tahun 201835

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan.....4

Gambar 2. Persentase capaian IKU dinas kesehatan 201823

Gambar 3. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2015-201825

Gambar 4. Penyebab Kematian Ibu tahun 201826

Gambar 5. Angka Kematian Bayi tahun 2015-201827

Gambar 6. Penyebab kematian pada bayi tahun 201828

Gambar 7. Anggaran Belanja Dinas Kesehatan 201831

Gambar 8. Realisasi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2018.....32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Renstra 2017-2022

Lampiran 2. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*) merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dikembangkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN menyatakan akuntabilitas sebagai salah satu azas umum dalam penyelenggaraan negara. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak

yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga.

Penyusunan Laporan Kinerja sangat penting dan strategis karena dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari perangkat daerah untuk tahun 2018 dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi perangkat daerah.

Selain itu, LKj juga merupakan alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja khususnya Dinas Kesehatan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Dengan demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2018 disusun dengan maksud memberikan deskripsi yang jelas tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah diamanatkan kepada Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Sedangkan tujuan penyusunan laporan akuntabilitas adalah:

1. Sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran tahun 2018.
2. Sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan tahun mendatang.

C. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi disebutkan bahwa Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Dinas Kesehatan adalah membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

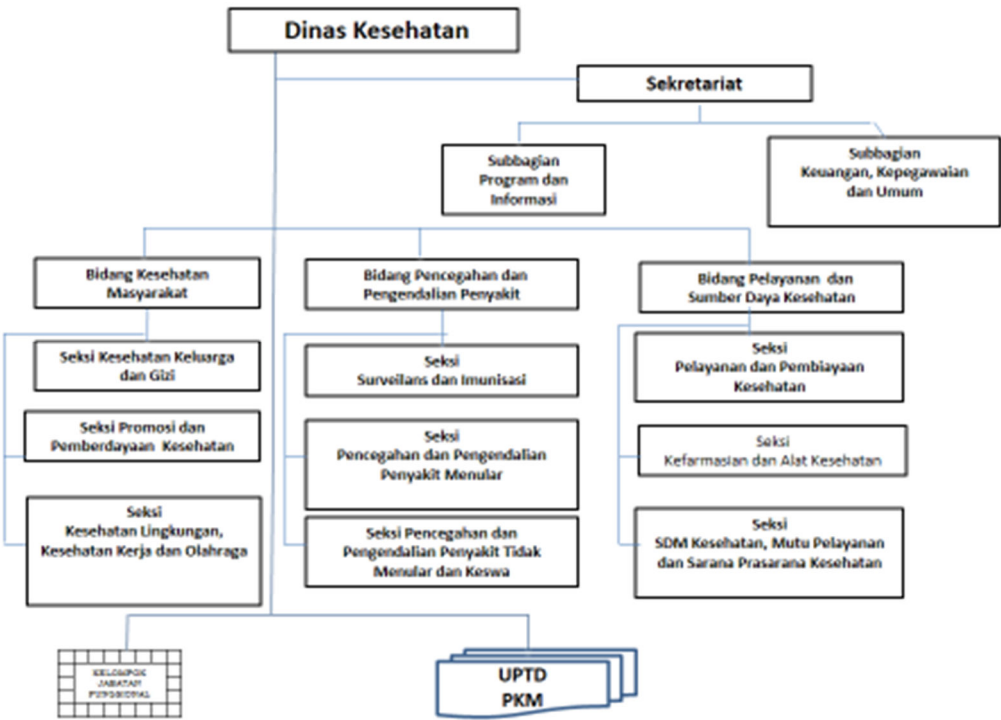
- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan dan Bagan Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan diatas, Dinas Kesehatan Kota Cimahi memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Program dan Informasi.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi 3 (tiga) seksi:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi 3 (tiga) seksi:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

- 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi 3 (tiga) seksi:
 - 1. Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan;
 - 2. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Cimahi selengkapnya.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Cimahi merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Cimahi. Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok: memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi di bidang kesehatan.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang kesehatan;
- c. Pengawasan dan pembinaan tugas bidang kesehatan;
- d. Pengelolaan administrasi kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Tugas Pokok: memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi Program dan Informasi dan operasional administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Umum.

Fungsi:

- a. Perencanaan operasional urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
- b. Pengelolaan urusan Program dan Informasi, Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
- c. Pengoordinasian urusan Program dan Informasi, Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Program dan Informasi, Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Program dan Informasi

Tugas Pokok: Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan

program/kegiatan dan anggaran serta data dan informasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan penghimpunan perencanaan program/kegiatan dan anggaran dari masing-masing bidang pada Dinas Kesehatan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dari masing-masing bidang pada Dinas Kesehatan;
- c. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dari seluruh program/kegiatan dan anggaran pada Dinas Kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Sub: Bagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum

Tugas Pokok: Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol keuangan, urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran pada Dinas Kesehatan.

Fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran, dan keuangan;
- b. Pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran, keuangan;
- c. Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran, keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas Pokok: Merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis kesehatan masyarakat dan pengendalian teknis kesehatan masyarakat

Fungsi:

- a. Perencanaan operasional Kegiatan Kesga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan Kesling, Kesja & olah raga
 - b. Pengelolaan urusan Kesga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan Kesling, Kesja & olah raga;
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Kesga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan Kesling, Kesja & olah raga;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
- Tugas Pokok: Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan seksi Kesehatan Keluarga dan gizi
- Fungsi:
- a. Merencanakan kegiatan urusan seksi Kesehatan Keluarga dan gizi;
 - b. Melaksanakan urusan seksi Kesehatan Keluarga dan gizi;
 - c. Melaksanakan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknis seksi Kesehatan Keluarga dan gizi;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
- Tugas pokok: Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol urusan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan
- Fungsi:
- a. Perencanaan kegiatan urusan seksi promosi kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan;
 - b. Pelaksanaan urusan seksi promosi kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan;
 - c. Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan Teknis, perencanaan promosi kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Tugas Pokok: Merencanakan kegiatan, melaksanakan urusan

Kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga

Fungsi:

- a. Merencanakan kegiatan urusan seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- b. Melaksanakan urusan Kesehatan Lingkungan, seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- c. Melaksanakan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknis seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Kepala Bidang: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tugas Pokok: Merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan pengendalian teknis Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

Fungsi:

- a. Perencanaan operasional Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- b. Pengelolaan urusan Pengamatan Penyakit dan Imunisasi; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pengamatan Penyakit dan Imunisasi; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi

Tugas Pokok: Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol urusan Pengamatan Penyakit dan Imunisasi.

Fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan urusan Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
- c. Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknis Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Tugas Pokok: Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol urusan Pencegahan dan Pengendalian Menular

Fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- b. Pelaksanaan urusan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- c. Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknis Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Keswa

Tugas Pokok: Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol urusan Pencegahan dan Pengendalian Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- b. Pelaksanaan urusan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- c. Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknis Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Tugas Pokok: Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; dan pengendalian teknis: Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, Kefarmasian dan Alkes dan SDM Kesehatan, Mutu pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.

Fungsi:

- a. Perencanaan operasional bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
- b. Pengelolaan urusan Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, Kefarmasian dan Alkes dan SDM Kesehatan, Mutu pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, Kefarmasian dan Alkes dan SDM Kesehatan, Mutu pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Kepala Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan

Tugas Pokok: Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrolururan pelayanan Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan.

Fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan pelayanan Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan;
- b. Pelaksanaan urusan pelayanan Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan;
- c. Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknis pelayanan Kesehatan dan Pembiayaan kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

15. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tugas Pokok: Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan urusan kefarmasian dan Alat Kesehatan
- b. Pelaksanaan urusan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- c. Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknis Kefarmasian dan Alat Kesehatan bidang Sumber Daya Kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Kepala Seksi SDM Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan

Tugas Pokok: Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol urusan SDM Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.

Fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan Pemenuhan, Penyebaran dan Pengadaan SDM Kesehatan, Menjaga dan meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan serta Pengadaan sarana dan Prasarana Puskesmas Yang Sesuai Standar;
- b. Pelaksanaan urusan Pemenuhan Penyebaran dan Pengadaan Sumber Daya Kesehatan Serta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan serta Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas;
- c. Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan Pemenuhan , Penyebaran dan Pengadaan Sumber Daya Kesehatan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPTD pada Dinas Kesehatan adalah Puskesmas, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas:

- a. Tugas Pokok :
 - 1. Upaya Pengobatan
 - 2. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
 - 3. Penyehatan lingkungan
 - 4. Perbaikan Gizi
 - 5. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 - 6. Melaksanakan Ketatausahaan Puskesmas
- b. Fungsi :
 - 1. Perencanaan kegiatan pelayanan masyarakat;
 - 2. Pelaksanaan Pembinaan teknis dan Pengawasan mutu, pelayanan kepada sarana pelayanan dasar swasta dan puskesmas;
 - 3. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan pelaporan kepada Dinas Kesehatan.

D. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kota Cimahi pada tahun 2018, termasuk di seluruh Puskesmas Kota Cimahi sebanyak 443 orang yang terdiri dari 371 orang PNS,1 orang Dokter PTT, 8 orang Bidan PTT, 1 orang Sanitarian PTT, 12 orang Bidan Harian Lepas (BHL) dan 50 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Sebagian besar pegawai merupakan tenaga kesehatan serta tenaga non kesehatan yang terdistribusi di Dinas Kesehatan dan 13 Puskesmas.

Tabel 1. Keadaan Tenaga Berdasarkan Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2015-2018

No	JENIS TENAGA	2015	2016	2017	2018
1	S2	15	16	15	17
2	Dokter Umum	52	47	43	41
3	Dokter Gigi	21	21	18	21
4	Dokter Spesialis	1	2	3	1
5	Sarjana Kesehatan Masyarakat	20	21	23	22
6	Apoteker	2	3	3	5
7	Sarjana Lain	22	10	9	5
8	Sarjana Keperawatan	3	1	1	1
9	Sarjana Sosial	8	6	6	7
10	Sarjana Gizi (D4 Gizi)	1	1	1	2
11	Akademi Perawat	44	44	46	43

No	JENIS TENAGA	2015	2016	2017	2018
12	Akademi Gizi	18	18	16	14
13	Akademi Analis Kesehatan	11	11	11	14
14	Akademi Kesehatan Lingkungan	11	11	12	12
15	Akademi Kebidanan	51	49	53	48
16	Akademi Kesehatan Gigi	15	15	15	15
17	Akademi Lainnya	12	5	5	5
18	D3 Rekam Medik	12	12	12	11
19	D1 Kebidanan	3	3	3	2
20	SPK	13	13	12	11
21	SPAG	1	1	1	1
22	SPRG	2	1	1	1
23	Analis	2	2	1	0
24	Asisten Apoteker	16	16	15	13
25	SPPH	2	2	2	2
26	KPAA/KCPK/PPPU	6	5	5	5
27	SMA sederajat	15	15	14	13
28	SMP sederajat	0	0	0	0
29	SD sederajat	2	2	1	1
30	Kontrak/Honoror/Tenaga Harian Lepas	49	52	51	50
31	Dokter PTT			1	1
32	Bidan Harian Lepas	6	6	6	12
33	Bidan PTT	8	8	8	8
34	Sanitarian PTT	1	1	1	1
35	Sarjana Farmasi		7	8	7
36	D4 Kebidanan		2	3	5
37	D4 Analis Kesehatan		4	4	4
38	D4 Kesehatan Lingkungan		1	1	1
39	D4 Kesehatan Gigi		1	1	1
40	D3 Farmasi		7	7	7
	JUMLAH	445	442	437	443

E. Issue Strategis

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan cukup beragam, dan untuk tahun 2018 yang dirumuskan sebagai isu strategis adalah sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di puskesmas dan jaringannya.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak merupakan upaya prioritas dalam pembangunan kesehatan. Hal ini dilakukan guna

menurunkan Angka Kematian Ibu, dan Angka Kematian Bayi; meningkatkan cakupan K4 ibu hamil, kunjungan bayi serta cakupan pelayanan anak balita. Selain itu, upaya yang perlu dilakukan adalah menurunkan prevalensi balita *stunting* dan kasus gizi buruk.

2. Meningkatnya kasus penyakit menular dan tidak menular.

Upaya pengendalian penyakit menular difokuskan pada penurunan prevalensi kasus penyakit HIV-AIDS, Tuberkulosis dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Hal ini dilakukan karena selama periode 2013 -2017 jumlah kasus ketiga penyakit tersebut cenderung terus mengalami peningkatan bahkan sampai terjadi kematian. Kota Cimahi pun mengalami *double burden diseases* dimana permasalahan penyakit menular masih menjadi beban sementara itu di sisi lain permasalahan penyakit tidak menular muncul secara bersamaan dan menjadi beban utama. Prevalensi hipertensi dan Diabetes Melitus (DM) memiliki kecenderungan terus meningkat, begitu pula halnya dengan permasalahan kesehatan jiwa. Keadaan ini perlu segera ditindaklanjuti mengingat dampak yang ditimbulkannya serta dalam rangka menjalankan amanat Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dimana target pencapaian indikator harus 100%.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki peran yang sangat penting sebagai pelaku dalam upaya pelayanan kesehatan. Meskipun secara kualitas cukup memadai, namun secara kuantitas dan jenisnya masih perlu ditambah karena belum memenuhi standar yang ditetapkan sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

4. Belum optimalnya aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan

Salah satu tugas Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah mewujudkan tersedianya Puskesmas Rawat Inap dan ambulans di setiap Kelurahan sebagai salah satu program prioritas Wali Kota Cimahi dalam misi kesatu RPJMD tahun 2017-2022. Upaya lainnya yang harus dilakukan adalah meningkatkan persentase puskesmas yang terakreditasi sebagai amanat Permenkes Nomor 75

tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan sasaran strategis dari Renstra Kemenkes tahun 2015-2019.

5. Belum optimalnya upaya penyehatan lingkungan
Pembangunan sektor lingkungan hidup difokuskan pada pembangunan kesehatan berwawasan lingkungan. Tujuan ini dapat dicapai melalui upaya peningkatan penyehatan lingkungan guna mewujudkan lingkungan kesehatan yang berkualitas. Hal ini juga merupakan bentuk implementasi dari rekomendasi hasil kajian RTRW dan KLHS. Lebih dari itu, upaya ini juga merupakan bentuk dukungan tercapainya target MDG's.
6. Belum optimalnya pembiayaan kesehatan
Kesadaran dan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan khususnya dalam hal pembiayaan kesehatan masih relatif kurang. Sejak diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014 dan ditargetkan pada tahun 2019 tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC) perlu dilakukannya peningkatan kesadaran masyarakat agar secara mandiri menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Selain hal tersebut diperlukan pula data yang valid masyarakat kurang mampu peserta PBI (penerima bantuan iuran) yang preminya dibayar Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Untuk menyelesaikan permasalahan ini maka perlu pemantapan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar target UHC pada tahun 2019 dapat terwujud.
7. Belum maksimalnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
Sebagian besar indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya promosi kesehatan belum mencapai target, untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan promotif dan preventif. Hal ini selaras dengan salah satu pilar yang digunakan untuk melaksanakan Program Indonesia Sehat yaitu pilar paradigma sehat melalui penguatan promotif dan preventif.
8. Sistem Manajemen Informasi Kesehatan yang belum optimal
Ketidaktersediaan data dan informasi yang komprehensif dan terintegrasi menjadi masalah krusial yang selalu muncul selama periode tahun 2013-2017, untuk itu perlu dilakukan pengembangan

sistem manajemen informasi kesehatan. Adanya pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kesehatan sebagai bentuk dukungan mewujudkan Cimahi sebagai Kota *Creative Cyber City* serta peningkatan *e-health*.

9. Kurangnya sinergitas regulasi dan kebijakan kesehatan

Hal ini terkait dengan adanya perbedaan waktu pemilihan kepala daerah kabupaten/kota, provinsi dan pemilihan presiden sehingga penyusunan rencana kerja, regulasi dan kebijakan kesehatan di masing-masing tingkat pemerintahan dapat mengakibatkan kurang sinergis.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Renstra Dinas Kesehatan tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan komprehensif dalam rangka penyusunan dan penetapan program dan kegiatan yang strategis untuk lima tahun kedepan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, serta memperhatikan Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 dan kebijakan dalam RPJMN. Renstra Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 disusun sebagai acuan pelaksanaan Program/kegiatan dan tolok ukur Penilaian Kinerja Pembangunan Kesehatan di Kota Cimahi Tahun 2017-2022, dan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan Tahunan yaitu Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka Dinas Kesehatan berperan dalam mensukseskan pencapaian Misi Kepala daerah terutama pada misi **pertama**, yaitu **“meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul”**.

Dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota melakukan upaya pembangunan kesehatan masyarakat dengan tujuan **“meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.”** Dinas Kesehatan juga menetapkan visi dan misi yang dianggap relevan dan mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah kota, dengan memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD serta sesuai dengan kondisi (profil) pelayanan kesehatan di Kota Cimahi saat ini.

1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Tahun 2017-2022

Untuk mewujudkan visi dan misi Wali Kota dalam melakukan upaya pembangunan kesehatan masyarakat dengan tujuan **“meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.”** maka Dinas Kesehatan juga menetapkan visi dan misi yang dianggap relevan dan sejalan guna mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah kota, dengan memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD serta sesuai dengan kondisi (profil) pelayanan kesehatan

di Kota Cimahi saat ini. Adapun Visi Dinas Kesehatan tahun 2017-2022 adalah “**Cimahi Sehat Mandiri**”.

Dari visi tersebut terkandung makna:

- **Sehat** mengandung pengertian bahwa Dinas Kesehatan Kota Cimahi mempunyai cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kota Cimahi yang sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap individu mampu untuk hidup produktif,
- **Mandiri**, mengandung pengertian bahwa Dinas Kesehatan Kota Cimahi mempunyai cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang mampu mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat sehingga terbebas dari gangguan kesehatan akibat penyakit, bencana, lingkungan dan perilaku yang buruk.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah misi dinas kesehatan, yaitu: “ **Meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat** “

Misi tersebut mengandung makna:

1. Masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan yang ditetapkan. Dengan memperhatikan dimensi mutu pelayanan seperti penampilan fisik fasilitas pendukung pelayanan, kemampuan memberikan pelayanan tepat waktu dan akurat, pelayanan yang cepat dan sesuai prosedur, rasa aman dan nyaman terhadap petugas yang kompeten serta kepedulian dan perhatian petugas kepada masyarakat akan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.
2. Masyarakat diberi kemudahan untuk memperoleh pelayanan kesehatan, baik dari segi fisik (jarak dan waktu tempuh), ekonomi (kemampuan finansial), maupun sosial yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara wajar, efektif dan efisien serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai dengan norma, etika, hukum dan sosial budaya.
3. Menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan baik pengetahuan maupun pemahaman akan kesehatan baik secara

individu, kelompok, dan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan secara bertahap sehingga menumbuhkan kemauan untuk berperilaku sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat melalui tindakan yang sistematis dan terencana secara bersama - sama oleh seluruh masyarakat yang dimulai dari keluarga.

2. Misi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tahun 2018

Dalam Renstra dinas kesehatan 2017-2022 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) dinas kesehatan yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Beserta Indikator Kinerja Tahun 2018

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target
Meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	102 per 100.000KH
			Angka Kematian Bayi	7.12 per 1000 KH
			Prevalensi Kurang Gizi	< 6.9%
			Indek Keluarga Sehat	0.40

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi 2018 ini menjadi acuan untuk mengukur capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2018 dan dilaporkan dalam laporan kinerja.

Untuk mengukur capaian dari sasaran strategis yang ada pada Rencana strategis ditetapkan sejumlah indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang akan dicapai pada tahun 2018. Indikator sasaran tersebut selain menjadi lampiran Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Cimahi sebagai pemberi mandat dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi sebagai penerima mandat. Indikator sasaran tersebut juga digunakan sebagai Indikator Kinerja

Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2018. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	102 per 100.000 KH
		Angka Kematian Bayi (AKB)	7.12 per 1000 KH
		Prevalensi Kurang Gizi	< 6.90 %
		Indek Keluarga Sehat	0.40 %

Selanjutnya dalam perjanjian kinerja tahun 2018 untuk mencapai sasaran strategis melalui Indikator Kinerja Utama, Dinas Kesehatan akan mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. **73.718.429.391,-**. Dalam mencapai target tersebut maka disusunlah program dan kegiatan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Program Dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2018

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.379.926.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.537.927.175
3	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	25,000,000
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	163.926.000
5	Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.221.555.900
6	Upaya Kesehatan Masyarakat	52.524.300.333
7	Pengawasan Obat dan Makanan	102.752.375
8	Pengembangan Obat Asli Indonesia	10.390.900
9	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	843.307.400
10	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	960.539.800
11	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.377.376.800
12	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	113,110,000
13	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	6,340.786.908
14	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	117,529,800
	TOTAL	73.718.429.391

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Esensi pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan dengan menggunakan program/kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran, hasil maupun dampak. Setiap program/kegiatan yang dilaksanakan selain harus dipertanggungjawabkan keuangannya juga harus memberikan hasil dan manfaat.

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka akuntabilitas kinerja, dan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU).

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana (target) dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian maka digunakan rumus sbb:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus sbb:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Tabel 5. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥90.1	Sangat Tinggi	
2	75.1 – 90	Tinggi	
3	65.1 – 75	Sedang	
4	50.1 – 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai upaya untuk menilai keberhasilan dan kegagalanpelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Tahun 2018.

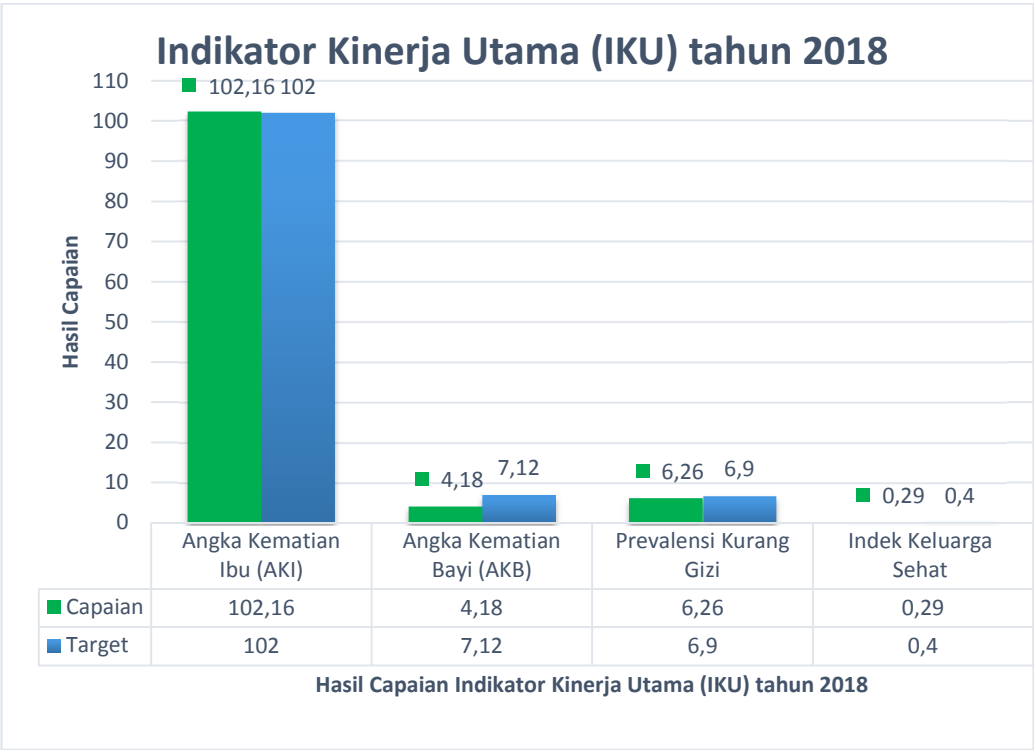
A. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama tahun 2018

Indikator kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan. Pengukuran pencapaian sasaran pembangunan kesehatan diukur dengan menggunakan indikator-indikator pembangunan kesehatan yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2018. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Berikut adalah hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama dinas kesehatan di tahun 2018.

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	PERHITUNGAN	% REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	102 /100.000 KH	$\frac{11}{10.767} \times 100.000 = 102.16$	102.16	99.84
		Angka KEmatian Bayi (AKB)	7.12 / 1000 KH	$\frac{50}{10.767} \times 100.000 = 4.18$	4.18	141.29
		Prevalensi Kurang Gizi	< 6.9 %	$\frac{2302}{36.777} \times 100.000 = 6.29$	6.26	109.28
		Indeks Keluarga Sehat	0.4	$\frac{32380}{112.287} = 0.29$	0.29	72.5

Berdasarkan skala nilai yang digunakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dari 4 indikator kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan pada tahun 2018 menunjukkan ada 3 indikator dengan capaian kinerja “ **sangat tinggi** “ (> 91%) dan 1 indikator dengan capaian kinerja “ **tinggi** “ (76-90%). Berikut grafik hasil capaian indikator kinerja utama (IKU) dinas kesehatan tahun 2018.



Gambar 2. Persentase capaian IKU dinas kesehatan 2018

Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, berdasarkan sasaran strategis dalam dokumen Renstra, dinas kesehatan hanya memiliki 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis untuk mendukung MISI 1 “ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul “ yaitu “ **meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** ” melalui pengukuran 4 (empat) indikator kinerja yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Prevalensi Kurang gizi dan Indek Keluarga Sehat (IKS). IKU tahun 2018 merupakan IKU yang pertama kali dilaksanakan dalam Renstra dinas kesehatan 2017-2022. Namun untuk analisis capaian beberapa indikator menggunakan hasil capaian di tahun 2017 pada periode Renstra sebelumnya. Berikut tabel yang menjelaskan hasil capaian IKU dalam periode terakhir Renstra dan tahun pertama awal pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017-2018

Indikator	Capaian Kinerja			
	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Angka Kematian Ibu (AKI)	102	113.98	102	102.16
Angka Kematian Bayi (AKB)	23	7.14	7.12	4.18
Prevalensi Kurang Gizi	17.8 %	6.94	< 6.90	6.29
Indek Keluarga Sehat	-	NA	0.40	0.29

Berdasarkan hasil capaian dari Indikator Kinerja Utama pada tabel diatas bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 terdapat penurunan pada 3 indikator yaitu Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Kurang Gizi. Hanya indikator Indek Keluarga Sehat yang belum dapat dibandingkan dengan tahun 2017 karena baru dilaksanakan pada tahun 2018. Berikut analisis untuk setiap Indikator IKU.

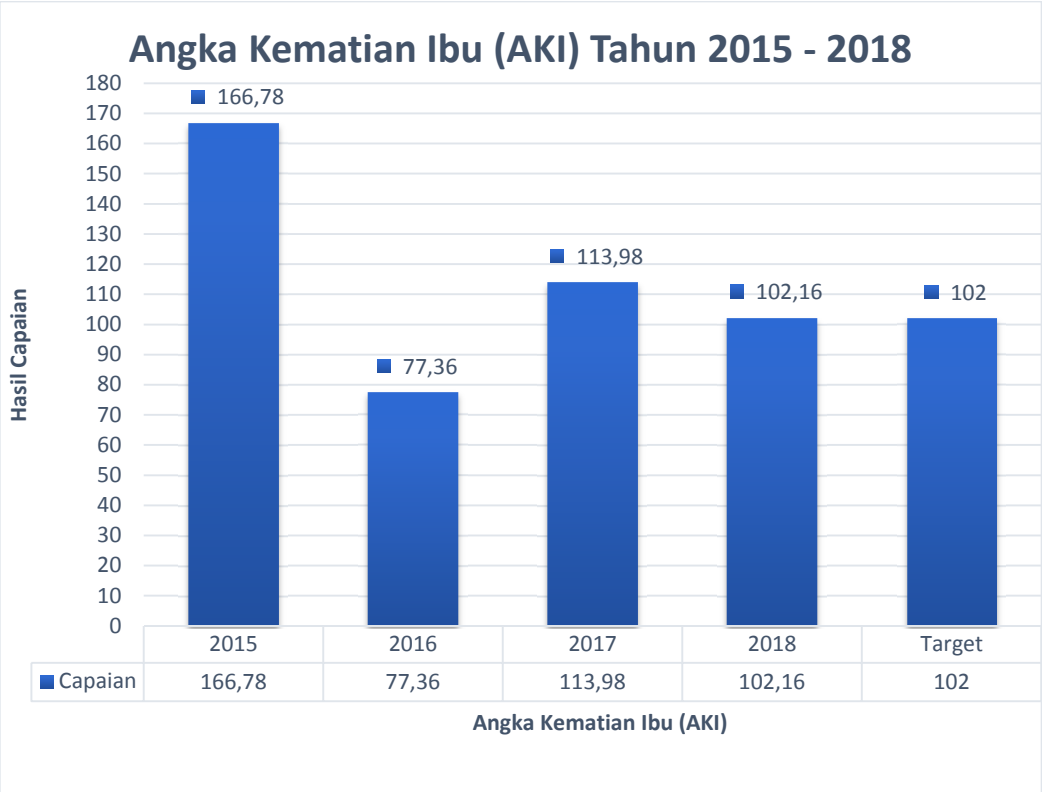
1. **Angka Kematian Ibu (AKI)**

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator yang menjadi masalah utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan hasil capaian terakhir pelaksanaan MDGs di tahun 2015 jumlah AKI di Indonesia sebesar 305 per 100.000 KH, sedangkan untuk Kota Cimahi sebesar 166.78 / 1000.000 KH, jauh diatas target yang telah ditetapkan yaitu 102 per 100.000 KH.

Pada tahun 2018 target AKI yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan 2017-2022 sebesar 102 /100.000 KH. Sementara itu hasil capaian

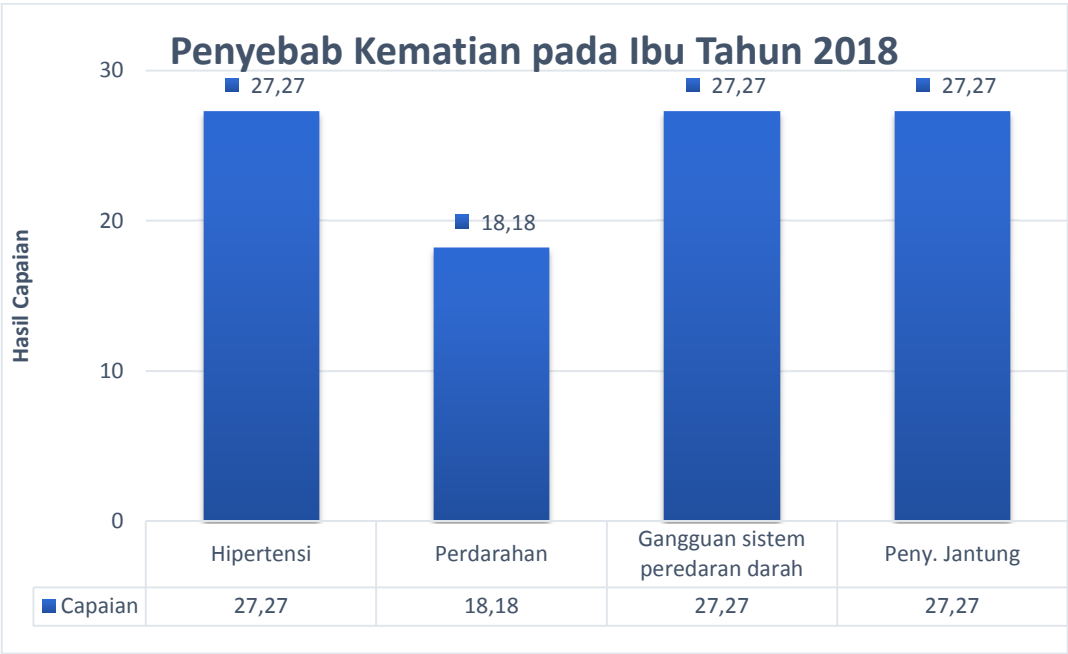
untuk AKI di tahun ini sebesar 102.16 /100.000 KH atau ada 11 kasus kematian ibu dari 10.767 Kelahiran Hidup yang terjadi di Kota Cimahi. Capaian ini bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 77.36/100.000 KH, jauh lebih tinggi sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2017 hasil capain AKI ini lebih rendah yaitu 113.98 / 100.000 KH. Kemudian bila dibandingkan dengan target RPJMD, Nasional maupun SDGs, capaian AKI tahun 2018 sedikit melebihi target 102.16/100.000 KH.

Angka Kematian Ibu di Kota Cimahi termasuk fluktuatif bila dilihat dalam beberapa tahun terakhir. Berikut grafik Angka Kematian Ibu dari tahun 2015 – 2018.



Gambar 3. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2015-2018

Ada beberapa penyebab langsung kematian ibu di tahun 2018. Penyebab langsung tersebut antara lain karena kasus hipertensi (3 kasus), perdarahan (2 kasus), gangguan peredaran darah (3 kasus) dan penyakit jantung (3 kasus). Berikut grafik yang menjelaskan kondisi penyebab langsung kematian ibu.



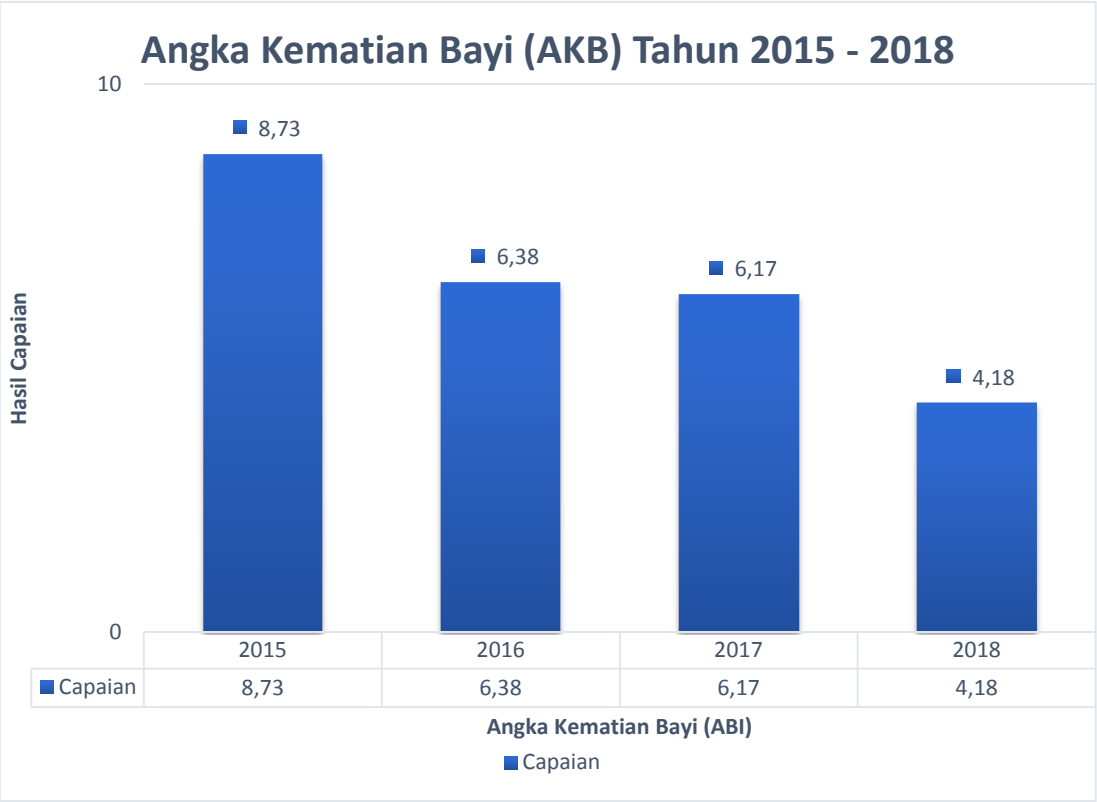
Gambar 4. Penyebab Kematian Ibu tahun 2018

Angka Kematian Ibu tahun 2018 bila dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), Bidan Praktek Mandiri, Pelaksanaan Kelas Ibu yang dilakukan oleh Puskesmas dan kunjungan terhadap kasus ibu hamil risiko tinggi, peningkatan jejaring rujukan ke RS dan sistem rujukan on line (call center), penata laksanaan kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir di puskesmas PONEB melalui pengembangan program EMAS, kerja sama lintas sektor, adanya peningkatan koordinasi dalam pencatatan dan pelaporan antara puskesmas dan bidan praktek mandiri, serta adanya hasil dari pendataan PIS-PK yang berfungsi sebagai baseline data untuk pendataan ibu hamil.

1. **Angka Kematian Bayi (AKB)**

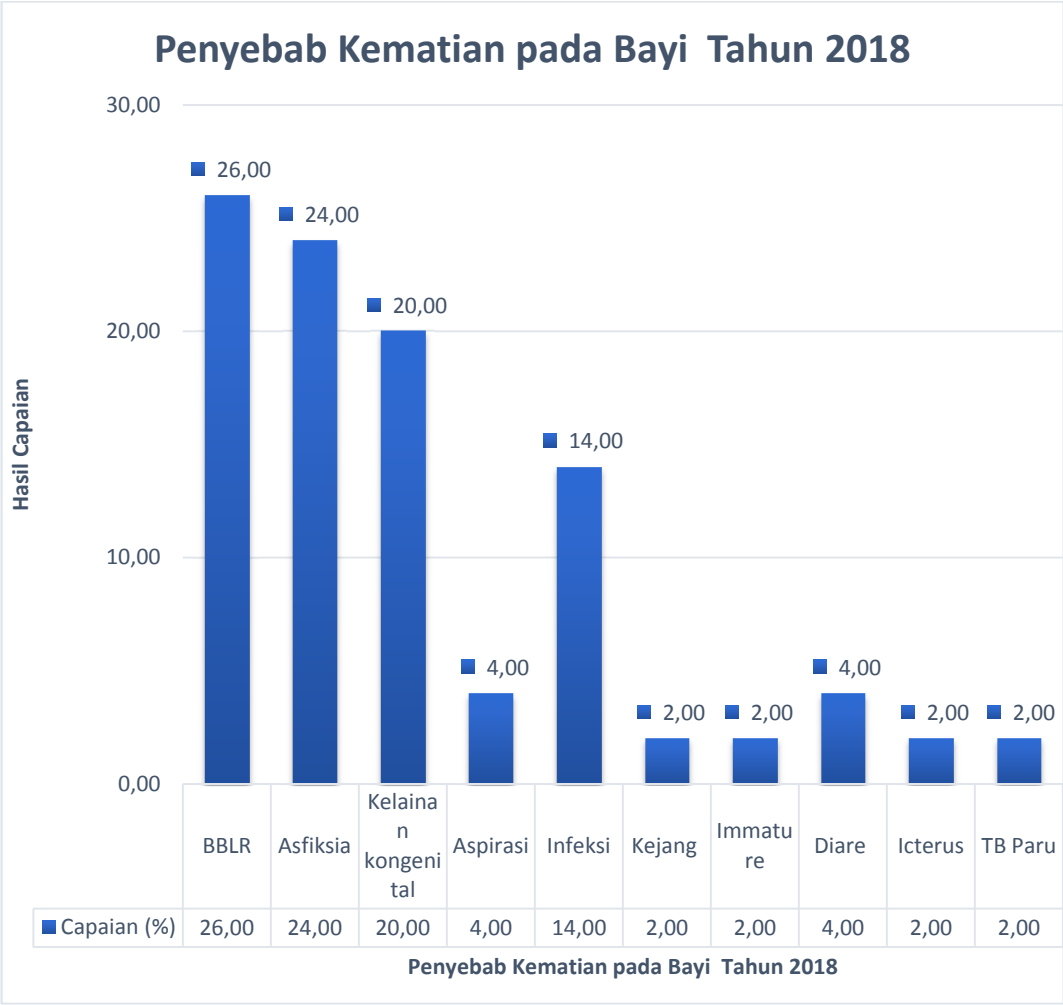
Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator kedua yang menjadi IKU dinas Kesehatan periode Renstra 2017-2022. Jumlah kematian pada bayi di Kota Cimahi tahun 2018 yang dilaporkan sebanyak 50 kasus dari 10.767 KH atau bila di konversikan maka Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 4.18 per 1000 KH. Angka Kematian Bayi tahun 2018 berada di bawah target Renstra 7.12 per 1000 KH, target Nasional dan SDGs yaitu 23/1000 KH. Jumlah kasus kematian bayi ditahun 2018 mengalami penurunan, jauh lebih rendah dari jumlah kematian bayi yang terjadi pada 5 (lima) tahun terakhir. Jumlah kasus kematian bayi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebanyak 89

kasus atau 8.73 per 1000 KH, namun masih dibawah target nasional. Berikut grafik Angka Kematian Bayi di Kota Cimahi tahun 2014-2018.



Gambar 5. Angka Kematian Bayi tahun 2015-2018

Adapun penyebab kematian bayi yang terjadi di tahun 2018 antara lain karena Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 13 kasus, Asfiksia 12 kasus, Kelainan kongenital 10 kasus, Aspirasi 2 kasus, Infeksi 7 kasus, diare 2 kasus, dan kasus lainnya seperti kejang 1 kasus, immature 1 kasus, icterus 1 kasus dan TB paru 1 kasus. Berikut grafik penyebab kematian bayi tahun 2018.



Gambar 6. Penyebab kematian pada bayi tahun 2018

Penurunan Jumlah kasus kematian pada bayi tahun ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, hal ini antara lain karena adanya peningkatan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), Bidan Praktek Mandiri, Pelaksanaan Kelas Ibu yang dilakukan oleh Puskesmas, Peningkatan jejaring rujukan ke RS dan sistem rujukan on line (call center), penata laksanaan kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir di puskesmas PONED melalui pengembangan program EMAS, adanya peningkatan koordinasi dalam pencatatan dan pelaporan antara puskesmas dan bidan praktek mandiri, kegiatan Audit Maternal Perinatal.

2. Prevalensi Kurang gizi

Balita kurang gizi (underweight) merupakan suatu kondisi status gizi balita kurang dan sangat kurang dengan indikator status gizi BB/U. Capaian untuk indikator prevalensi kurang gizi di tahun 2018 sebesar 6.29 % atau ada 2.302 balita kurang gizi dari 36.777 balita yang datang dan di timbang di

posyandu pada saat Bulan Penimbangan Balita (BPB) serta hasil sweeping yang dilakukan oleh kader. Bila dibandingkan dengan capaian di tahun 2017 sebesar 6.94%, hasil capaian indikator prevalensi kurang gizi tahun 2018 ini mengalami penurunan dan masih berada dibawah target Renstra < 6.9% dan target nasional 17.8%

Penurunan prevalensi kurang gizi ini terjadi antara lain karena adanya peningkatan kegiatan surveilans gizi aktif yang dilakukan oleh Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) puskesmas dan kader kesehatan di setiap RW, sehingga jumlah penemuan kasus/ masalah gizi menjadi lebih cepat ditemukan dan ditangani. Selain itu ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menangani masalah gizi tersebut antara lain pelaksanaan konseling dan penyuluhan Gizi di PKM dan Posyandu, Kunjungan rumah terhadap balita 2T dan gizi buruk, pengaktifan kembali pos gizi di beberapa RW, pelaksanaan kelas Balita BGM, kegiatan pemberian Makanan Tambahan (PMT/PMT-P).

3. Indek Keluarga Sehat

Indek Keluarga Sehat merupakan salah satu indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan yang tercantum dalam renstra Dinas Kesehatan tahun 2017-2022. Indikator Indek Keluarga Sehat (IKS) adalah indikator yang menjadi alat ukur dalam pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yang terdiri atas 4 (empat) area prioritas, meliputi: penurunan angka kematian ibu dan bayi; penurunan prevalensi balita pendek (*stunting*); penanggulangan penyakit menular; dan penanggulangan penyakit tidak menular. IKS terdiri dari 12 (dua belas) indikator dan dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu keluarga tidak sehat (merah : < 0.50), keluarga pra sehat (kuning : 0.50 – 0.80), keluarga sehat (hijau : >0.80).

Pelaksanaan pendataan PIS-PK Kota Cimahi pertama kali dimulai pada semester II tahun 2017 dengan lokus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan di Kelurahan Utama dengan hasil capaian Indeks Keluarga Sehat sebesar 0,39 % atau termasuk kategori keluarga tidak sehat. Kemudian pada tahun 2018 pendataan PIS-PK dilaksanakan secara serentak di 15 Kelurahan sekota Cimahi. Adapun hasil capaian dari pendataan PIS-PK tahun 2018 dengan 12 (dua belas) indikator keluarga sehat di Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

- a. Program Gizi, Kesehatan ibu dan Anak, terdiri dari :

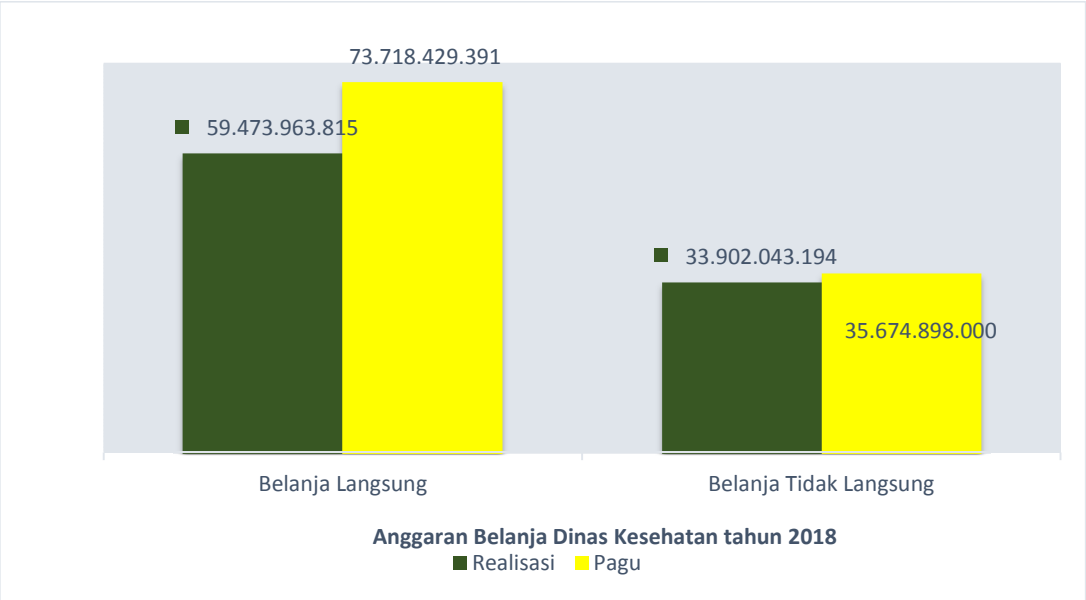
- 1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 68.76 %
- 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan 96.03 %
- 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap 91.86 %
- 4) Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif 77.07 %
- 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan 86.83 %
- b. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
 - 1) Penderita tuberculosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar 58.36 %
 - 2) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur 27.08%
 - 3) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan 43.57%
- c. Perilaku dan Kesehatan Lingkungan
 - 1) Anggota keluarga tidak ada yang merokok 42.13 %
 - 2) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 69.23 %
 - 3) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih 98.37 %
 - 4) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. 92.75%

Berdasarkan hasil pendataan PIS-PK terhadap 12 indikator diatas maka capaian IKS tahun 2018 untuk kota Cimahi sebesar 0.29 % termasuk dalam kategori keluarga tidak sehat, masih dibawah target Renstra yaitu 0.40%. Hal ini disebabkan karena proses pendataan PIS-PK belum selesai 100% dilaksanakan oleh puskesmas, dari jumlah sasaran KK di Kota Cimahi sebanyak 152.633 KK, yang telah terdata dan dikunjungi sebanyak 119.743 KK. Adapun hasil IKS untuk masing-masing kecamatan adalah kecamatan Cimahi Utara dengan nilai IKS 0.29 %, kecamatan Cimahi tengah 0.33 % dan kecamatan Cimahi Selatan 0.26 %. Dari 12 indikator utama keluarga sehat, cakupan tertinggi ada pada indikator keluarga mempunyai akses sarana air bersih, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di kota Cimahi memiliki kemudahan untuk mendapatkan air bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan untuk capaian indikator keluarga sehat yang terendah adalah indikator penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Rendahnya hasil capaian indikator ini karena masyarakat banyak yang tidak menyadari bahwa mereka telah memiliki risiko penyakit hipertensi.

B. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2018 ada berbagai sumber anggaran yang dapat digunakan antara lain APBD Kota Cimahi, APBD Provinsi Jawa Barat, dana kapitasi JKN dan APBN. Di tahun 2018 total jumlah anggaran yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya adalah sebesar Rp. 109.393.327.391,- yang terdiri dari anggaran untuk Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 73.718.429.391,- dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 35.674.898.000,-. Sedangkan untuk realisasi penyerapan Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 59.473.963.815,- atau 80,68 % dan untuk Belanja Tidak Langsung realisasinya sebesar Rp. 33.902.043.194,- atau 95.03 %, sehingga total realisasi anggaran dinas kesehatan di tahun 2018 sebesar Rp. 93,376.007.009,- atau 85.36 %.

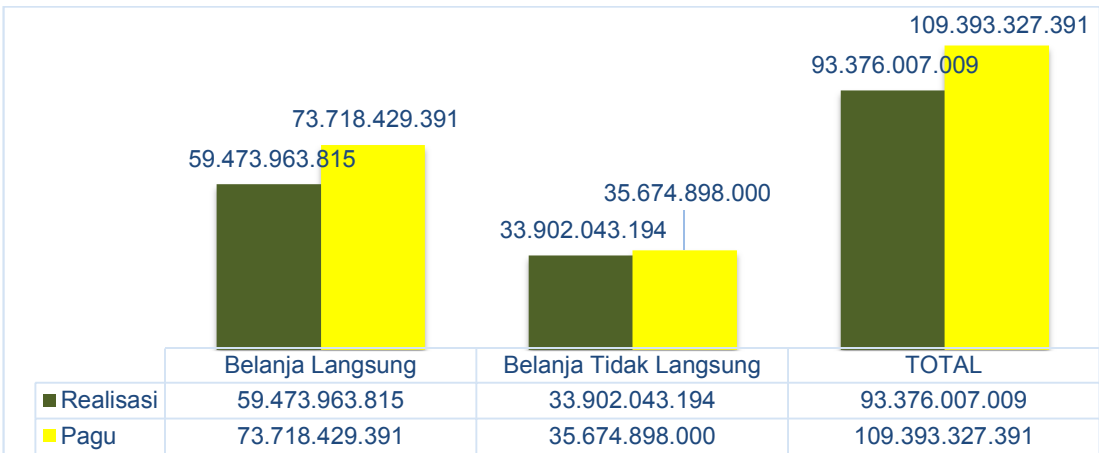
Gambaran pemanfaatan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung berdasarkan realisasi anggaran dan belanja daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 7. Anggaran Belanja Dinas Kesehatan 2018

Tabel 8. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Belanja Langsung	73,718,429,391	59,473,963,815	80,68
2	Belanja Tidak Langsung	35,674,898,000	33,902,043,194	95,03
	TOTAL	109,393,327,391	93,376,007,009	85,36



Gambar 8. Realisasi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2018

Pada tahun 2018 untuk anggaran Belanja Langsung (BL), Dinas kesehatan memiliki 14 (empat belas) program dan 69 kegiatan yang tersebar di bidang sebanyak 44 kegiatan, dan 25 di sekretariat yang merupakan belanja rutin dinas. Hasil realisasi anggaran untuk setiap program di bidang bervariasi dengan capaian realisasi terendah sebesar 76.46% ada pada program Upaya Kesehatan Masyarakat, sedang capaian realisasi tertinggi ada pada program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin sebesar 97.88%. Sedangkan di sekretariat (belanja rutin) untuk realisasi tertinggi ada pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 100%. Berikut tabel hasil capaian realisasi anggaran untuk seluruh program di tahun 2018.

Tabel 9. Realisasi Anggaran per Program Tahun 2018

Kode Prog	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,379,926,000	1,906,999,281	80.13
02	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	5,537,927,175	5,349,312,489	96.59
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25,000,000	25,000,000	100
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	163,926,000	130,315,850	79.50
15	Obat Dan Perbekalan Kesehatan	3,221,555,900	2,669,933,729	82.88
16	Upaya Kesehatan Masyarakat	52,524,300,333	40,161,382,879	76.46
17	Pengawasan Obat Dan Makanan	102,752,375	97,705,780	95.09
18	Pengembangan Obat Asli Indonesia	10,390,900	10,335,900	99.47
19	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	843,307,400	762,456,000	90.41

Kode Prog	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
22	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	960,539,800	902,255,395	93.93
23	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1,377,376,800	1,291,843,197	93.79
24	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	113,110,000	110,713,100	97.88
25	Pengadaan Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	6,340,786,908	5,940,680,415	93.69
30	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	117,529,800	115,029,800	97.87
	Total	73,718,429,391	59,473,963,815	80.68

Secara keseluruhan realisasi penyerapan anggaran dinas kesehatan kota Cimahi tahun 2018 sebesar 80.68 % atau termasuk kategori tinggi. Berbeda dengan hasil realisasi anggaran di tahun 2017, tahun ini terjadi peningkatan baik kinerja maupun realisasi anggaran. Dari 14 (empat belas) program yang dilaksanakan pada tahun 2018, hasil capaian realisasi keuangannya termasuk dalam katagori tinggi dan sangat tinggi. Berikut kategori berdasarkan capaian realisasi anggaran dan program-program di tahun 2018, yatu:

1. Kategori tinggi (capaian 76% - 90%), ada 4 program yang memiliki hasil capaian dengan nilai > 76 %, antara lain program :
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - Obat Dan Perbekalan Kesehatan
 - Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Katagori sangat tinggi (capaian > 90%)
 - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Program Pengawasan Obat Dan Makanan
 - Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
 - Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

- Program Pengadaan Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Sementara itu untuk realisasi keuangan dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 sangat bervariasi pula, ada yang realisasi keuangannya sangat tinggi ($> 91\%$) tetapi ada pula beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya sangat rendah ($< 50\%$) sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Realisasi Pemanfaatan Anggaran Kegiatan Tahun 2018

Kode Program /Kegiatan	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
01	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.379.926.000	1.906.999.281	80.13
01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	450.000	50.00
01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	654.000.000	367.730.673	56.23
01 05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	255.000.000	200.798.940	78.74
01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	31.00000	22.996.000	74.18
01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	320.000.000	297.186.000	92.87
01 10	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	80.000.000	74.849.000	93.56
01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104.516.000	70.811.300	67.75
01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.500.000	57.220.000	84.77
01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	7.780.000	77.80
01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	57.890.000	48.993.500	84.63
01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	406.120.000	398.585.868	98.14
01 20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan rumah dinas	393.000.000	359.598.000	91.50
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.537.927.175	5.349.312.489	96.59
02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	3.948.000.000	3.948.000.000	100.0
02 10	Pengadaan Meubeleur	26.000.000	25.700.000	98.85
02 13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	287.567.175	253.184.089	88.04
02 22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	25.000.000	24.988.000	99.95
02 24	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	983.860.000	862.671.800	87.68
02 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	60.000.000	27.268.600	45.45
02 40	Penyediaan gudang	207.500.000	207.500.000	100.0
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000	25.000.000	100.0
05 06	Pembinaan Pegawai	25.000.000	25.000.000	100.0

Kode Program /Kegiatan	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	163.926.000	130.315.850	79.50
06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	104.210.000	78.882.850	75.70
06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9.797.000	6.608.000	67.45
06 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20.015.000	15.546.000	77.67
06 08	Pengendalian pengelolaan keuangan dan aset	29.904.000	29.279.000	97.91
15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.221.555.900	2.669.933.729	82.88
15 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.221.555.900	2.669.933.729	82.88
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	52.524.300.333	40.161.382.879	76.46
16 05	Perbaikan Gizi Masyarakat	346.801.000	342.475.000	98.75
16 06	Revitalisasi sistem kesehatan	1.127.370.800	1.111.275.800	98.57
16 07	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	794.485.548	788.308.748	99.22
16 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	535.738.100	430.347.275	80.33
16 11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	568.751.000	496.097.557	87.23
16 13	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	233.487.000	204.452.820	87.56
16 16	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	441.059.000	400.598.000	90.83
16 25	Jaminan Kesehatan Nasional Kota Cimahi	9.683.372.732	9.408.915.844	97.17
16 26	Jaminan Kesehatan bagi penerima Bantuan iuran (PBI) di Luar Kuota Jamkesmas	2.058.141.300	2.044.359.600	99.33
16 27	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Utara	2.947.700.506	1.908.967.723	64.76
16 28	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pasirkaliki	926.943.629	568.189.437	61.30

Kode Program /Kegiatan	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
16 29	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Citeureup	1.549.608.734	1.089.026.170	70.28
16 30	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cipageran	2.506.066.090	1.682.171.273	67.12
16 31	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Tengah	2.809.128.635	1.982.715.831	70.58
16 32	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Padasuka	2.744.123.160	1.935.074.822	70.52
16 33	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cigugur Tengah	2.563.981.033	1.712.700.182	66.80
16 34	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Selatan	2.242.234.497	1.636.318.270	72.98
16 35	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Melong Asih	2.137.245.427	1.445.467.444	67.63
16 36	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cibeureum	2.496.175.145	1.892.420.743	75.81
16 37	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Leuwigajah	1.459.986.915	1.053.818.287	72.18
16 38	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cibeber	1.162.715.432	932.259.822	80.18
16 39	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Melong Tengah	998.410.150	832.270.790	83.36
16 40	Bantuan Operasional Kesehatan	7.847.389.000	4.711.987.140	60.05
16 41	Jaminan Persalinan	2.081.800.000	1.310.640.301	62.96
16 42	Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat	134.448.000	129.105.000	96.03
16 43	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	127.137.500	111.419.000	87.64
17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	102.752.375	97.705.780	95.09

Kode Program /Kegiatan	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
17 01	Peningkatan pemberdayaan konsumen / masyarakat di bidang obat dan makanan	60.516.650	56.311.305	93.05
17 02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	42.235.725	41.394.475	98.01
18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	10.390.900	10.335.900	99.47
18 03	Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri	10.390.900	10.335.900	99.47
19	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	843.307.400	762.456.000	90.41
19 02	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	705.497.400	627.259.000	88.91
19 06	Pengembangan KIE dampak asap rokok	137.810.000	135.197.000	98.10
22	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	960.539.800	902.255.395	93.93
22 05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	221.380.000	199.980.000	90.33
22 06	Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik dan Epidemik	223.162.000	203.091.600	91.01
22 08	Peningkatan imunisasi	167.176.000	163.562.395	97.84
22 09	Peningkatan surveilans epidemiologi penanggulangan wabah	183.680.000	177.100.000	96.42
22 12	Penanggulangan HIV-AIDS	165.141.800	158.521.400	95.99
23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.377.376.800	1.291.843.197	93.79
23 02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	1.160.483.800	1.080.011.647	93.07
23 04	Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standara pelayanan kesehatan	128.919.000	127.145.750	98.62
23 08	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	87.974.000	84.685.800	96.26

Kode Program /Kegiatan	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	113.110.000	110.713.100	97.87
24 04	Pelayanan Sunatan Massal	113.110.000	110.713.100	97.87
25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	6.340.786.908	5.940.680.415	93.69
25 06	Pengadaan sarana dan Prasarana Puskesmas	6.298.286.908	5.913.658.180	93.89
25 23	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan kesehatan	42.500.000	27.022.235	63.58
30	Program Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia	117.529.800	115.029.800	80.68
30.01	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	117.529.800	115.029.800	80.68
JUMLAH		73.718.429.391	59.473.963.815	80.68

Dari tabel di atas terdapat 2 kegiatan dengan realisasi keuangan **sangat rendah**, (kurang dari 50%) yaitu kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Realisasi keuangannya sangat rendah karena anggaran yang disediakan untuk membayar jasa caraka tidak diserap secara maksimal karena dalam pelaksanaannya untuk pengiriman undangan/surat dari Dinas ke puskesmas dititipkan kepada petugas puskesmas yang setor ke Dinas.

2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor.

Adanya kesulitan dalam penyedia jasa pemeliharaan alat kantor terkait sistem pembayarn non tunai untuk penyedia tertentu

Realisasi keuangan dengan kategori **rendah** (capaian 51-65%) ada pada kegiatan-kegiatan berikut ini :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (56.23%)

Pemakaian jasa komunikasi/telekomunikasi menurun karena jarang digunakan oleh puskesmas, sering mennggunaka fasilitas seluruh.

2. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan kesehatan (63.58%)

Pengajuan pemeliharaan peralatan berasal dari 5 puskesmas yang akan melaksanakan akreditasi dan PKM yang memiliki anggaran untuk kalibrasi sedikit.

3. Bantuan Operasional Kesehatan (60.05%)

Juknis terlambat diterima, dan pencairan baru terlaksana pada bulan Mei sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dibayarkan walaupun sudah dilaksanakan. Dengan adanya mekanisme pencairan APBD yang kurang fleksibel mengakibatkan terjadi perubahan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh puskesmas.

4. Jaminan Persalinan (62.96 %)

Terkendala dengan petunjuk teknis jaminan persalinan yang kurang lengkap mengenai beberapa hal dalam pengajuan klaim oleh bidan untuk penanganan rujukan pasien sebelum ke rumah sakit, pelaksanaan pelayanan jampersal yang dimulai tidak pada awal tahun.

5. Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Utara (64.76 %)

Efisiensi penggunaan anggaran serta adanya silpa JKN tahun sebelumnya yang besar dan belum dapat dimanfaatkan secara

maksimal.

6. Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pasirkaliki (61.30 %)

Ada kegiatan sosialisasi yang tidak dapat dilaksanakan dan belanja pengadaan alat kesehatan yang tidak diserap karena tidak tersedia dalam e-catalog.

Realisasi keuangan dengan kategori sedang (65.1 – 75 %) ada pada kegiatan-kegiatan berikut ini :

1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (67.75 %)

Penyediaan barang cetakan tidak seluruhnya direalisasikan karena ada beberapa jenis cetakan yang tidak gunakan lagi dan PKM dapat menyediakan sendiri, sedangkan untuk penggandaan karena terkait sistem pembayaran Non Tunai realisasinya menjadi lebih sedikit.
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan (74.18 %), efisiensi penggunaan anggaran.
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (67.45 %)
4. Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Citeureup (70.28)
5. Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cipageran (67.12)
6. Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Tengah (70.58%)
7. Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Padasuka (70.52%)
8. Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cigugur Tengah (66.80 %)
9. Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Selatan (72.98%)
10. Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Melong Asih (67.63%)
11. Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Leuwigajah (72.18%)

Untuk hasil realisasi pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional Di 13 puskesmas, sebagian besar anggaran

tidak terserap seluruhnya karena jumlah penambahan Silpa JKN tahun sebelumnya yang cukup besar, sehingga PKM belum dapat memaksimalkan penyerapan seluruh anggaran yang tersedia. Sementara itu untuk realisasi keuangan dengan kategori tinggi (75.1 – 90 %) ada pada 19 (sembilan belas) kegiatan, dan untuk realisasi keuangan dengan kategori sangat tinggi (> 91%) ada sebanyak 31 (tiga puluh satu) kegiatan dan sebagian besar merupakan efisiensi anggaran dan kegiatannya telah 100% dilaksanakan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tatakelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Dari empat indikator kinerja utama (IKU) kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2018, menunjukkan bahwa capaian kinerja pada 3 IKU sudah masuk pada kategori sangat tinggi (>90%) yaitu indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Prevalensi Kurang Gizi, sedangkan 1 IKU yang capaian kinerjanya masuk dalam kategori tinggi (75.1 % - 90%) adalah indikator Indek Keluarga Sehat.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan ke depan. *Pertama*, walaupun mayoritas IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa masalah di masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti seperti permasalahan pembiayaan kesehatan dan persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan. *Kedua*, Laporan bulanan pelayanan kesehatan saat ini hanya berasal dari FKTP Pemerintah (Puskesmas) dan BPM (Bidan Praktek Mandiri) yang menyampaikan laporan pelayannya ke puskesmas. FKTP swasta lainnya (klinik dan dokter praktek swasta) belum secara maksimal memberikan laporan. Untuk selanjutnya diharapkan semua FKTP swasta mengirimkan laporan ke puskesmas agar didapat gambaran pelayanan kesehatan di Kota Cimahi yang sebenarnya. *Ketiga*, hasil pelaksanaan pendataan keluarga sehat (PIS-PK) tahun 2018 yang belum 100% selesai di kota Cimahi menjadi tantangan dan perhatian selanjutnya bagi dinas kesehatan untuk menentukan langkah dan strategi agar dapat tercapai target yang telah ditetapkan terutama untuk peningkatan persentase keluarga sehat di kota Cimahi. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Meskipun masih ditemukan beberapa kendala, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam penyusunan Laporan Kinerja, diharapkan untuk waktu yang akan datang pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan semakin baik.

Lampiran 1. Hasil Renstra 2017-2022

MISI	VISI DINAS	MISI DINKES	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA
						Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul	Cimahi Sehat Mandiri	Meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	82,45	82,47	82,49	82,51	82,53	82,55	82,55	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	AKI	113,98	102	101,5	101	100	99	99 per 100.000 KH
													AKB	7,14	7,12	7,10	7,0	6,9	6,8	6.8 per 1000 KH
													Prevalensi kurang gizi	6,94	< 6.9%	< 6.8 %	< 6.7 %	< 6.6 %	< 6.5 %	< 6.5 %
													Indeks Keluarga Sehat	NA	0,4	0,405	0,41	0,415	0,42	0,42

Lampiran 2. Hasil Renstra 2017-2022 (lanjutan)

STRATEGI	Arah Kebijakan		PROGRAM 2018	Indikator Program Tahun 2018	PROGRAM 2019-2022	INDIKAT OR PROGRA M	KONDI SI AWAL (2017)	TARGET CAPAIAN								TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA		
								Tahun 2018	Anggaran	Tahun 2019	Anggaran	Tahun 2020	Anggaran	Tahun 2021	Anggaran		Tahun 2022	Anggaran
Mengemban gkan upaya- upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan perorangan	Meningkatka n Pelayanan kesehatan ibu dan Anak di wilayah kerja puskesmas	1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-Penurunan Angka Kematian Ibu (102/100.000 KH) '- Penurunan Angka Kematian Bayi (23/1000 KH)	Program Upaya Peningkata n Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	Persenta se peningka tan kategori keluarga sehat	NA	NA	8.157.85 6.475	3%	7.214.500.0 00	5%	7.583.000 .000	7%	8.311.000. 000	9%	8.825.000. 000	9%
						Prevalen si stunting pada baduta	12,04 %	< 12.04		< 12.04		< 12.04		< 12.04		< 12.04		< 12.04
	Pemberian dan pemantauan bantuan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil kurang gizi		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-Penurunan Angka Kematian Ibu (102/100.000 KH) '- Penurunan Angka Kematian Bayi (23/1000 KH)							7.214.500.0 00		7.583.000 .000		8.311.000. 000		8.825.000. 000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

STRATEGI	Arah Kebijakan		PROGRAM 2018	Indikator Program Tahun 2018	PROGRAM 2019-2022	INDIKAT OR PROGRA M	KONDI SI AWAL (2017)	TARGET CAPAIAN								TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA		
								Tahun 2018	Anggaran	Tahun 2019	Anggaran	Tahun 2020	Anggaran	Tahun 2021	Anggaran		Tahun 2022	Anggaran
		6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan santun lansia : 100%														
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-Penurunan Angka Kematian Ibu (102/100.000 KH) '- Penurunan Angka Kematian Bayi (23/1000 KH)														
Meningkatka n kualitas penyediaan pelayanan kesehatan	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di fasyankes	1	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	IKM dalam bidang pelayanan kesehatan	Program Peningkata n Kualitas Penyediaa n Pelayanan Kesehatan	Persenta se puskesm as terakredi tasi minimal dengan strata Madya	38,46	61,54	4.512.27 8.335	76,92	6.350.000.0 00	84,62	5.550.000 .000	92,31	5.870.000. 000	92,31	5.870.000. 000	92,31

[illegible]

STRATEGI	Arah Kebijakan		PROGRAM 2018	Indikator Program Tahun 2018	PROGRAM 2019-2022	INDIKAT OR PROGRA M	KONDI SI AWAL (2017)	TARGET CAPAIAN								TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA		
								Tahun 2018	Anggaran	Tahun 2019	Anggaran	Tahun 2020	Anggaran	Tahun 2021	Anggaran		Tahun 2022	Anggaran
				Bayi (23/1000 KH)														
	Pengembangan sistem informasi dan aplikasi pelayanan rujukan		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	IKM dalam bidang pelayanan kesehatan														
Meningkatkan cakupan pembiayaan kesehatan	Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Cimahi	1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-Penurunan Angka Kematian Ibu (102/100.000 KH) '- Penurunan Angka Kematian Bayi (23/1000 KH)	Program Pengembangan Pembiayaan Kesehatan	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional	74,26 %	88,26%	30.567.744.000	90%	20.858.440.000	92%	21.605.352.000	95%	22.552.640.000	100%	23.899.168.000	100%

STRATEGI	Arah Kebijakan		PROGRAM 2018	Indikator Program Tahun 2018	PROGRAM 2019-2022	INDIKAT OR PROGRA M	KONDI SI AWAL (2017)	TARGET CAPAIAN								TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA		
								Tahun 2018	Anggaran	Tahun 2019	Anggaran	Tahun 2020	Anggaran	Tahun 2021	Anggaran		Tahun 2022	Anggaran
											20.858.440.000		21.605.352.000		22.552.640.000		23.899.168.000	
BIDANG											34.422.940.000		34.738.352.000		36.733.640.000		38.594.168.000	
EX BAU											4.374.500.000		4.339.500.000		4.440.500.000		4.863.000.000	
Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara		100%	8.075.853.175	100%	3.738.500.000	100%	3.697.500.000	100%	3.832.500.000	100%	4.162.000.000	
						Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi		100%		100%	3.738.500.000	100%	3.697.500.000	100%	3.832.500.000	100%	4.162.000.000	

[illegible]

[illegible]

STRATEGI	Arah Kebijakan		PROGRAM 2018	Indikator Program Tahun 2018	PROGRAM 2019-2022	INDIKAT OR PROGRA M	KONDI SI AWAL (2017)	TARGET CAPAIAN								TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA		
								Tahun 2018	Anggaran	Tahun 2019	Anggaran	Tahun 2020	Anggaran	Tahun 2021	Anggaran		Tahun 2022	Anggaran
	Peningkatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP	60,68 (B)	70 (B)	259.275.000	75 (BB)	356.000.000	79(BB)	442.000.000	83(A)	413.000.000	85(A)	501.000.000	
						Persentase capaian penyerapan anggaran	85%	85%		85%		85%		85%		85%		
Meningkatkan kualitas aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur penyelenggaraan pemerintahan		Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur		Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara	Persentase ASN yang dibina	100%	100%	206.500.000	100%	280.000.000	100%	200.000.000	100%	195.000.000	100%	200.000.000	
									51.779.506.985		38.797.440.000		39.077.852.000		41.174.140.000		43.457.168.000	

Lampiran 3. Hasil Renstra 2017-2022 (Lanjutan)

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal (2017)	TARGET CAPAIAN										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
			Tahun ke -1	Anggaran	Tahun ke -2	Anggaran	Tahun ke -3	Anggaran	Tahun ke -4	Anggaran	Tahun ke -5	Anggaran		
Pelayanan Kesehatan ibu dan anak	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	89,12	100		100	840.000.000	100	870.000.000	100	925.000.000	100	950.000.000	100%	Dinkes
	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	91,82	100		100		100		100		100		100%	
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	91,09	100		100		100		100		100		100%	
Penanggulangan masalah gizi masyarakat	Persentase rematri mendapat Tablet Tambah darah (TTD)	32,60%	32,8		33	375.000.000	34	375.000.000	35	425.000.000	36	440.000.000	36%	
	Persentase Ibu hamil KEK	2,41 %	2,4		2,39		2,38		2,37		2,36		2,36	

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal (2017)	TARGET CAPAIAN										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
			Tahun ke -1	Anggaran	Tahun ke -2	Anggaran	Tahun ke -3	Anggaran	Tahun ke -4	Anggaran	Tahun ke -5	Anggaran		
Pelayanan Kesehatan anak usia sekolah	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100		100	385.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100%	
Pelayanan sunatan massal	Jumlah anak dari keluarga miskin yang dikhitan	75 anak	75 anak		75 anak	120.000.000	75 anak	120.000.000	75 anak	130.000.000	75 anak	125.000.000	375 anak	
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS	52,66	55		60	900.000.000	65	950.000.000	70	980.000.000	75	1.000.000.000	75%	
	Cakupan strata RW Siaga Aktif purnama dan mandiri	30,45	40		50		60		70		80		80%	
Peningkatan KIE dampak asap rokok	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasyankes	NA	5%		7	300.000.000	9	325.000.000	11	350.000.000	13	375.000.000	13%	
	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di perkantoran	NA	5%		7		9		11		13		13%	

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal (2017)	TARGET CAPAIAN										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
			Tahun ke -1	Anggaran	Tahun ke -2	Anggaran	Tahun ke -3	Anggaran	Tahun ke -4	Anggaran	Tahun ke -5	Anggaran		
Peningkatan Promosi obat bahan alami asli Indonesia di dalam dan di luar negeri	Jumlah RW percontohan baru yang mendapatkan pembinaan dan memanfaatkan TOGA	15 RW	15 RW		15 RW	25.000.000	15 RW	25.000.000	15 RW	28.000.000	15 RW	30.000.000	75 RW	
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	Persentase peserta Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) yang lulus dan mendapatkan sertifikat	100%	100%		100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	62.000.000	100%	
	Persentase sarana IRTP yang diaudit	100 % (100 unit)	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Jumlah kantin/warung sekolah (PJAS) yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	27 unit	40		42	50.000.000	44	50.000.000	46	50.000.000	48	53.000.000	48 unit	

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal (2017)	TARGET CAPAIAN										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
			Tahun ke -1	Anggaran	Tahun ke -2	Anggaran	Tahun ke -3	Anggaran	Tahun ke -4	Anggaran	Tahun ke -5	Anggaran		
	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang mendapat pembinaan dan pengawasan	40 unit	41		42		44		46		48		48 unit	
Peningkatan Pelayanan Kesehatan masyarakat	Cakupan asuhan keperawatan keluarga yang dilayani sesuai standar	80	81		82	175.000.000	83	185.000.000	84	180.000.000	85	200.000.000	85%	
	Cakupan kunjungan masyarakat ke fasyankes	34,08	70		75		80		85		90		90%	
Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat	Persentase akses penduduk terhadap air minum berkualitas	81,99	82%		83	330.000.000	84	360.000.000	85	390.000.000	86	425.000.000	86%	

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal (2017)	TARGET CAPAIAN										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
			Tahun ke -1	Anggaran	Tahun ke -2	Anggaran	Tahun ke -3	Anggaran	Tahun ke -4	Anggaran	Tahun ke -5	Anggaran		
	Persentase akses penduduk terhadap jamban sehat	70,5	70,75%		71		71,5		72		72,5		72,5 %	
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Persentase rumah sehat	63,96%	64%		65	300.000.000	66	330.000.000	67	360.000.000	68	390.000.000	68%	
Pelayanan pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB	109,89	100		100	480.000.000	100	510.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100%	
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik & Epidemik	Angka Bebas Jentik (ABJ)	81,17	≥95%		≥95%	250.000.000	≥95%	270.000.000	≥95%	320.000.000	≥95%	375.000.000	≥95%	
Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penanggulangan Wabah	Penemuan Kasus AFP pada penduduk < 15 tahun	6,15	≥ 2/100000		≥ 2/100000	175.000.000	≥ 2/100000	175.000.000	≥ 2/100000	180.000.000	≥ 2/100000	200.000.000	≥ 2/100000	

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal (2017)	TARGET CAPAIAN										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
			Tahun ke -1	Anggaran	Tahun ke -2	Anggaran	Tahun ke -3	Anggaran	Tahun ke -4	Anggaran	Tahun ke -5	Anggaran		
Penanggulangan HIV AIDS	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	28,35	100		100	400.000.000	100	463.000.000	100	500.000.000	100	575.000.000	100%	
Peningkatan Pelayanan Imunisasi	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	93,6	93		93	350.000.000	93	365.000.000	93	425.000.000	93	480.000.000	93,00%	
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	47,82	100		100	1.000.000.000	100	1.025.000.000	100	1.170.000.000	100	1.185.000.000	100%	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	26,16	100		100		100		100		100		100%	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus	70,86	100		100		100		100		100		100%	

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal (2017)	TARGET CAPAIAN										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
			Tahun ke -1	Anggaran	Tahun ke -2	Anggaran	Tahun ke -3	Anggaran	Tahun ke -4	Anggaran	Tahun ke -5	Anggaran		
Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	70,44	100		100	374.500.000	100	400.000.000	100	478.000.000	100	510.000.000	100%	
Penyelenggaraan dan pembinaan kesehatan kerja dan Olah raga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	6 pos	6		8	200.000.000	10	200.000.000	12	230.000.000	15	250.000.000	15 pos	
	Persentase jemaah haji yang diperiksa kebugarannya	77,33	78		80		85		88		90		90%	
Peningkatan kesehatan lansia	Persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	43,97	100		100	125.000.000	100	125.000.000	100	130.000.000	100	150.000.000	100%	
Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah indikator SPM dengan cakupan > 80%	5	7		9		10		11		12		12	

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal (2017)	TARGET CAPAIAN										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
			Tahun ke -1	Anggaran	Tahun ke -2	Anggaran	Tahun ke -3	Anggaran	Tahun ke -4	Anggaran	Tahun ke -5	Anggaran		
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang meningkat stratanya	2	2		2	400.000.000	3	475.000.000	3	600.000.000	3	500.000.000	13 PKM	
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase nakes yang terlatih	100	100		100	500.000.000	100	470.000.000	100	495.000.000	100	285.000.000	100%	
Akreditasi Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ter-Akreditasi	4 pkm	3 (Cibeber, Cibeureum, Cigugur)		3	400.000.000		600.000.000		648.000.000		860.000.000	13 PKM	
	Jumlah Puskesmas re-akreditasi	NA			3		4		3		3		13 PKM	
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase obat pelayanan kesehatan dasar (sesuai Fornas) yang telah diajukan oleh puskesmas	100	100		100	2.420.000.000	100	2.400.000.000	100	2.375.000.000	100	2.200.000.000	100%	

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal (2017)	TARGET CAPAIAN										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
			Tahun ke -1	Anggaran	Tahun ke -2	Anggaran	Tahun ke -3	Anggaran	Tahun ke -4	Anggaran	Tahun ke -5	Anggaran		
	Persentase reagen dan bahan habis pakai yang diajukan oleh puskesmas	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah puskesmas atau pustu yang mendapatkan pengadaan perbaikan prasarana (Puskemas Rawat inap)	5	5		7	1.300.000.000	3	350.000.000	3	452.000.000	2	852.000.000	14 pkm dan pustu, 1 pkm rawat inap	
	Jumlah pengadaan sarana kendaraan operasional (ambulans dan motor) di puskesmas		3 ambulans				4 motor		2 motor		2 motor		11 kendaraan (3 ambulans + 8 motor)	

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal (2017)	TARGET CAPAIAN										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
			Tahun ke -1	Anggaran	Tahun ke -2	Anggaran	Tahun ke -3	Anggaran	Tahun ke -4	Anggaran	Tahun ke -5	Anggaran		
Pengadaan alat kesehatan dan pelayanan kefarmasian	Persentase pemenuhan kebutuhan alat kesehatan	100	100		100	950.000.000	100	855.000.000	100	875.000.000	100	775.000.000	100%	
Pengembangan dan pemutakhiran Data dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang melaporkan data kesehatan secara lengkap dan tepat waktu	NA	80%		85	380.000.000	90	400.000.000	95	425.000.000	100	398.000.000	100%	
Pembiayaan Kesehatan Kota Cimahi	Persentase pembiayaan kesehatan bagi PBI JKN Kota Cimahi (60 % dari premi)	95,91	100		100	4.000.000.000	100	4.200.000.000	100	4.400.000.000	100	4.600.000.000	100%	
	Persentase pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota PBI (Jamkesda)	97,33	100		100		100		100		100		100%	

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal (2017)	TARGET CAPAIAN										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
			Tahun ke -1	Anggaran	Tahun ke -2	Anggaran	Tahun ke -3	Anggaran	Tahun ke -4	Anggaran	Tahun ke -5	Anggaran		
Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat	Persentase pembiayaan kesehatan bagi PBI JKN Kota Cimahi (40 % dari premi)	95,91	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100%	
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di puskesmas dan jaringannya	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	15,68	17		20	-	25	70.000.000						
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Utara	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Utara	50,55	100		100	1.730.304.000	100	1.772.424.000	100	1.838.376.000	100	1.926.648.000	100%	

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal (2017)	TARGET CAPAIAN										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
			Tahun ke -1	Anggaran	Tahun ke -2	Anggaran	Tahun ke -3	Anggaran	Tahun ke -4	Anggaran	Tahun ke -5	Anggaran		
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pasirkaliki	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Pasirkaliki	15,00	100		100	654.552.000	100	696.528.000	100	741.384.000	100	829.584.000	100%	
Pelayanan Kesehatan dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Citeureup	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Citeureup	75,03	100		100	1.147.896.000	100	1.189.944.000	100	1.244.520.000	100	1.332.720.000	100%	
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cipageran	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cipageran	48,18	100		100	1.457.784.000	100	1.499.832.000	100	1.560.456.000	100	1.648.656.000	100%	

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal (2017)	TARGET CAPAIAN										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
			Tahun ke -1	Anggaran	Tahun ke -2	Anggaran	Tahun ke -3	Anggaran	Tahun ke -4	Anggaran	Tahun ke -5	Anggaran		
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Tengah	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Tengah	26,45	100		100	1.817.928.000	100	1.860.048.000	100	1.927.728.000	100	2.016.000.000	100%	
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Padasuka	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Padasuka	16,16	100		100	1.634.040.000	100	1.676.088.000	100	1.740.168.000	100	1.828.368.000	100%	
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cigugur Tengah	Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cigugur Tengah	31,29	100		100	1.590.840.000	100	1.632.888.000	100	1.696.104.000	100	1.784.304.000	100%	

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal (2017)	TARGET CAPAIAN										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
			Tahun ke -1	Anggaran	Tahun ke -2	Anggaran	Tahun ke -3	Anggaran	Tahun ke -4	Anggaran	Tahun ke -5	Anggaran		
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Selatan	Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Selatan	58,76	100		100	1.462.104.000	100	1.504.224.000	100	1.564.920.000	100	1.653.048.000	100%	
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Melong Asih	Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Melong Asih	44,63	100		100	1.341.360.000	100	1.383.408.000	100	1.441.800.000	100	1.530.000.000	100%	
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cibeureum	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cibeureum	58,61	100		100	1.552.680.000	100	1.594.800.000	100	1.657.296.000	100	1.745.496.000	100%	

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal (2017)	TARGET CAPAIAN										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
			Tahun ke -1	Anggaran	Tahun ke -2	Anggaran	Tahun ke -3	Anggaran	Tahun ke -4	Anggaran	Tahun ke -5	Anggaran		
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cibeber	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cibeber	49,59	100		100	812.736.000	100	854.784.000	100	902.808.000	100	991.008.000	100%	
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Leuwigajah	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Leuwigajah	49,27	100		100	912.744.000	100	954.864.000	100	1.004.904.000	100	1.093.104.000	100%	
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Melong Tengah	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Melong Tengah	81,87	100		100	743.472.000	100	785.520.000	100	832.176.000	100	920.232.000	100%	
Jaminan Persalinan	Persentase pembiayaan persalinan bersumber dana Jampersal (di luar peserta JKN)	6,93	100		100		100		100		100		100%	

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal (2017)	TARGET CAPAIAN										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
			Tahun ke -1	Anggaran	Tahun ke -2	Anggaran	Tahun ke -3	Anggaran	Tahun ke -4	Anggaran	Tahun ke -5	Anggaran		
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 bulan	0		12 bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	95.000.000	12 bulan	103.500.000	12 bulan	
Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	Jumlah bulan jasa komunikasi	12 bulan	0		12 bulan	705.000.000	12 bulan	700.000.000	12 bulan	750.000.000	12 bulan	750.000.000	12 bulan	
	Jumlah bulan jasa listrik	12 bulan	0		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
	Jumlah bulan jasa air	12 bulan	0		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan media informasi	12 bulan	0		12 bulan	65.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	125.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	
	Jumlah bulan penggandaan	12 bulan	0		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah pengadaan kendaraan	8 Unit	0		0	1.000.000.000	4 unit	1.000.000.000	2 unit	1.100.000.000	2 unit	1.150.000.000	2 unit	
	Jumlah kendaraan yang dipelihara	108 Unit	108 Unit		108 Unit		112 Unit		114 Unit		116 Unit		116 Unit	
	Jumlah kendaraan asuransi yang dibayar	60 Unit	81 unit		108		64 Unit		66 Unit		68 Unit		68 Unit	

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal (2017)	TARGET CAPAIAN										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
			Tahun ke -1	Anggaran	Tahun ke -2	Anggaran	Tahun ke -3	Anggaran	Tahun ke -4	Anggaran	Tahun ke -5	Anggaran		
Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor	Jumlah meja	80 Unit	0 Unit		2 Unit	75.000.000	8 Unit	70.000.000	5 Unit	100.000.000	5 Unit	115.000.000	94 Unit	
	Jumlah kursi	24 Unit	0 Unit		2 Unit		8 Unit		5 Unit		5 Unit		100 Unit	
	Jumlah lemari	1 Set	0 Unit		1 Unit		0 Unit		0 Unit		1 Unit		26 Unit	
	Jumlah set partisi	0 Set	0 Set		2 Set		0 Set		1 Set		1 Set		1 Set	
Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah unit komputer	40 Unit	0 Unit		7 Unit	195.000.000	5 Unit	175.000.000	4 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	58 Unit	
	Jumlah unit printer	43 Unit	0 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		55 Unit	
	Jumlah unit server	1 Unit	0 Unit		0 Unit		1 Unit		0 Unit		1 Unit		3 Unit	
	Jumlah unit ac	9 Unit	0 Unit		3 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		18 Unit	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 bulan			12 bulan	361.000.000	12 bulan	365.000.000	12 bulan	390.000.000	12 bulan	390.000.000	12 bulan	
Penyediaan gudang kantor	Jumlah gudang		2 Unit		1 Unit	90.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	
Pemeliharaan rumah dan gedung dinas	Jumlah bulan pemeliharaan	12 bulan			12 bulan	400.000.000	12 bulan	425.000.000	12 bulan	490.000.000	12 bulan	490.000.000	12 bulan	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga		3 Set	0 Set	3 Set	7.500.000	3 Set	7.500.000	3 Set	8.000.000	3 Set	8.500.000	3 Set	

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal (2017)	TARGET CAPAIAN										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
			Tahun ke -1	Anggaran	Tahun ke -2	Anggaran	Tahun ke -3	Anggaran	Tahun ke -4	Anggaran	Tahun ke -5	Anggaran		
Penataan arsip daerah	Jumlah arsip aktif dan inaktif	"" Dokumen	0 Dokumen		2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	8 Dokumen	
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan	Jumlah bulan THL yang diasuransikan	12 bulan	0 Bulan		12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	
Pengadaan seragam pegawai	Jumlah set seragam pegawai	0	0 Set		0 Set	225.000.000	370 Set	225.000.000	0 Set	-	370 Set	225.000.000	370 Set	
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	0 bulan		12 bulan	67.500.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	
Koordinasi dan konsultasi kedinasan	Jumlah perjalanan dinas	554 Kali	0 Kali		600 Kali	397.500.000	650 Kali	410.000.000	680 Kali	414.500.000	725 Kali	415.000.000	725 Kali	
	Jumlah perjalanan caraka	50 Kali	0 Kali		65 Kali		70 Kali		75 Kali		80 Kali		80 Kali	
Penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, LKIP dan LPPD PD	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	4 Dokumen	0 Dokumen		4 dokumen	125.000.000	4 dokumen	155.000.000	4 dokumen	173.000.000	4 dokumen	190.000.000	4 dokumen	

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal (2017)	TARGET CAPAIAN										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
			Tahun ke -1	Anggaran	Tahun ke -2	Anggaran	Tahun ke -3	Anggaran	Tahun ke -4	Anggaran	Tahun ke -5	Anggaran		
	Jumlah dokumen LPPD	1 Dokumen	0 Dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	
	Jumlah dokumen LKIP	1 Dokumen	0 Dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	
Penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur Perangkat Daerah	Jumlah SOP	NA Dokumen	0 Dokumen		2 dokumen	25.000.000	0 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	15.000.000	2 dokumen	
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA	1 dokumen	1 dokumen			40.000.000	1 dokumen	90.000.000		50.000.000	1 dokumen	110.000.000	1 dokumen	
	Jumlah dokumen RENJA	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	
Penyusunan anggaran perangkat daerah	Jumlah dokumen anggaran	2 dokumen	4 dokumen		2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	65.000.000	2 dokumen	65.000.000	2 dokumen	65.000.000	2 dokumen	
Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	68.000.000	1 dokumen	67.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	66.000.000	1 dokumen	

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal (2017)	TARGET CAPAIAN										TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
			Tahun ke -1	Anggaran	Tahun ke -2	Anggaran	Tahun ke -3	Anggaran	Tahun ke -4	Anggaran	Tahun ke -5	Anggaran		
Penyusunan Laporan Inventaris Barang	Jumlah dokumen Laporan Inventaris Barang	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	38.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	
Pengembangan kapasitas sumberdaya pegawai	Jumlah ASN yang dibina	100%	100%		100%	280.000.000	100%	200.000.000	100%	195.000.000	100%	200.000.000	100%	
	Jumlah ASN yang terlatih	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

Cimahi, Juni 2018
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Cimahi

drg. Pratiwi, M.Kes
NIP 196206191989012001